

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Kompas	Sindo	Tempo
Indopos	Pos Kota	Warta Kota

PERUMAHAN RAKYAT

Demi Warga, DKI Revisi Aturan DP 0

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana merevisi peraturan agar memudahkan warga mengakses program fasilitasi hunian tanpa uang muka atau program DP 0. Dari 1.458 pemohon kredit perumahan rakyat Bank DKI, baru 225 permohonan yang disetujui untuk DP 0.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, peminat program DP 0 tinggi dan mempunyai kemampuan mencicil. Akan tetapi, banyak yang terbentur persyaratan administratif perbankan. Salah satu kendala utama karena banyak pemohon mempunyai kredit lain yang belum lunas.

"Ini adalah situasi yang dihadapi masyarakat yang secara sosial ekonomi rendah. Mereka menghadapi persoalan pinjaman yang bervariasi. Saat masuk sistem perbankan formal, mereka bertemu dengan ketentuan yang tidak fleksibel," katanya se usai peletakan batu pertama di lokasi kedua hunian DP 0 di Nuansa Cilangkap, Kelurahan Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (12/12/2019).

Kepala UPT DP 0 Dzikran Kurniawan menjelaskan, banyak warga punya utang sepeda motor hingga utang dalam jaringan (*fintech*). Sesuai aturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, permohonan kredit sulit lolos dengan kondisi ini.

Dari 780 unit hunian DP 0 di Nuansa Pondok Kelapa, Jakarta Timur, sudah sekitar 3.500 pendaftar program DP 0. Dari jumlah itu, 1.458 pemohon lolos syarat administrasi dan sudah mengisi formulir pengajuan KPR Bank DKI. Namun, baru 225 pemohon yang disetujui. Sebanyak 125 di antaranya sudah akad kredit dan lainnya masih menunggu jadwal.

Anies mengatakan, Pemprov DKI tengah merevisi peraturan untuk mengatasi kendala yang dihadapi banyak pemohon program DP 0. Revisi dimaksudkan agar peminat yang mempunyai kemampuan mencicil tetapi memiliki kendala lain tetap bisa memanfaatkan skema ini.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Kelik Indriyanto mengatakan, koordinasi dengan Bank DKI terkait peraturan itu sudah dilakukan Pemprov DKI. "Kami berharap secepatnya 780 unit bisa lolos kredit. Namun, ada kehati-hatian pihak bank agar penyaluran kredit tepat sasaran dan tidak menjadi kredit macet," ujarnya.

Nuansa Cilangkap yang menjadi lokasi kedua fasilitasi perumahan program DP 0 mulai dibangun dan ditargetkan selesai dalam 18 bulan atau pertengahan 2021. Ditambah 780 unit di Nuansa Pondok Kelapa, pembangunan yang dilakukan Perumda Pembangunan Sarana Jaya itu akan menambah 850 unit DP 0 sehingga menjadi 1.630 unit pertengahan 2021.

Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan mengatakan, empat menara akan dibangun di lahan seluas 2,9 hektar. Setiap menara terdiri atas 24 lantai dengan 850 unit. Untuk DP 0, direncanakan di satu menara dengan tipe unit kantar studio dan dua ruang tidur.

Pemprov DKI menargetkan 14.000 unit hunian DP 0 pada 2017-2022 oleh BUMD. Dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah DKI, pemprov menargetkan sekitar 232.000 hunian layak tinggal, baik sewa maupun milik, yang dibangun BUMD, BUMN, dan swasta. Sebanyak Rp 500 miliar dianggarkan untuk bantuan pinjaman DP 0 dalam Raperda APBD DKI 2020. Anggaran pinjaman DP 0 yang terserap pada 2019 sekitar Rp 350 miliar. (IRE)